

STRATEGI DIPLOMASI POLITIK PADA DINASTI ABBASIYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONFLIK IRAN-ISRAEL DALAM DINAMIKA TIMUR TENGAH KONTEMPORER

Elly Syaharani¹, Marlina Sihana², Saiful Mahfud³

^{1,2,3}Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates

Email: ellysyaharani04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi politik yang dipraktikkan pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) dan relevansinya terhadap konflik Iran-Israel dalam dinamika Timur Tengah kontemporer. Latar belakang penelitian berangkat dari fakta bahwa kawasan Timur Tengah hingga kini terus diwarnai ketegangan yang kompleks, di mana Iran dan Israel menjadi dua aktor utama yang saling berhadapan secara ideologis, geopolitik, dan militer. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer dan sekunder yang relevan, mencakup jurnal ilmiah, buku sejarah Islam, dan dokumen kebijakan kontemporer. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan historis-komparatif, menghubungkan praktik diplomasi Abbasiyah yang mencakup *balance of power*, aliansi lintas ideologi, dan negosiasi multilateral dengan pola konflik Iran-Israel saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip diplomatik Abbasiyah, seperti fleksibilitas ideologi, keterlibatan aktor eksternal, dan pengelolaan pluralisme internal, memiliki relevansi konseptual yang signifikan untuk memahami dan menawarkan jalan keluar dari kebuntuan diplomatik Iran-Israel yang dipenuhi dimensi agama, nuklir, dan perebutan pengaruh regional.

Kata kunci: Dinasti Abbasiyah, diplomasi Islam, konflik Iran-Israel, Timur Tengah, geopolitik.

ABSTRACT

This study examines the political diplomacy strategies practiced during the Abbasid Dynasty (750–1258 AD) and their relevance to the Iran-Israel conflict within the dynamics of the contemporary Middle East. The study departs from the reality that the Middle East region continues to be characterized by complex tensions, with Iran and Israel as two major actors confronting each other ideologically, geopolitically, and militarily. Data were collected through library research by examining relevant primary and secondary sources, including scientific journals, Islamic history books, and contemporary policy documents. The analysis was conducted using a qualitative-descriptive approach with a historical-comparative method, linking Abbasid diplomatic practices encompassing balance of power, cross-ideological alliances, and multilateral negotiations with contemporary patterns of the Iran-Israel conflict. The findings indicate that Abbasid diplomatic principles, such as ideological flexibility, external actor engagement, and the management of internal pluralism, carry significant conceptual relevance for understanding and offering a way out of the Iran-Israel diplomatic impasse, which is laden with religious, nuclear, and regional influence competition dimensions.

Keywords: Abbasid Dynasty, Islamic diplomacy, Iran-Israel conflict, Middle East, geopolitics.

A. PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah telah lama menjadi arena pergolakan geopolitik yang tidak pernah benar-benar sepi dari konflik dan ketegangan. Di antara berbagai perselisihan yang berlangsung di kawasan ini, konflik antara Iran dan Israel muncul sebagai salah satu rivalitas paling kompleks dan paling sarat muatan ideologis di abad ke-21. Perseteruan kedua negara tersebut tidak semata-mata berakar pada kepentingan strategis sempit, melainkan juga melibatkan dimensi agama, identitas nasional, ambisi nuklir, serta persaingan pengaruh yang merambah ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, dan Irak.¹ Dalam kerangka ini, studi atas sejarah peradaban Islam klasik, khususnya era Dinasti Abbasiyah, menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana diplomasi politik pernah berhasil mengelola kemajemukan dan tekanan eksternal secara bersamaan. Upaya melihat ke belakang bukan sekadar nostalgia intelektual, melainkan sebuah kebutuhan metodologis untuk menemukan preseden historis bagi tantangan-tantangan kontemporer yang tampaknya terus berulang.

Dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 M merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar yang pernah ada, dan di bawah kepemimpinannya peradaban Islam mencapai puncak kejayaan intelektual, ilmiah, dan diplomatik.² Para khalifah Abbasiyah, terutama Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya mengelola wilayah yang sangat luas secara administratif, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Kekaisaran Bizantium dan berbagai kerajaan Asia. Kebijakan inklusif mereka terhadap etnis non-Arab, terutama bangsa Persia dan Turki, mencerminkan strategi *balance of power* dan pengelolaan pluralisme yang canggih. Bahkan dalam kondisi tekanan militer dan disintegrasi internal sekalipun, Dinasti Abbasiyah mampu mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya selama lebih dari lima abad, sebuah pencapaian yang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan diplomasi politiknya.³

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tentang diplomasi Abbasiyah dan konflik Iran-Israel umumnya dilakukan secara terpisah. Dari sisi sejarah Islam, studi seperti Siregar et al. (2025) membahas pemikiran politik pada masa Umayyah dan Abbasiyah dengan menekankan relevansi Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun terhadap realitas politik Islam

¹ Mujahid Mallombasi Arsyad, Muhammad Zain, and Bahaking Rama, "Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, dan Kegemilangan Peradaban Islam," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 85–98.

² Ibid.

³ A. Najili Aminullah, *DINASTI BANI ABASSIYAH, POLITIK, PERADABAN DAN INTELEKTUAL*, 2017.hlm .13

klasik, namun tidak secara eksplisit menghubungkan temuan tersebut dengan konflik kontemporer di Timur Tengah. Sementara itu, penelitian seperti Nisa (2025) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik Iran-Israel secara mendalam, meliputi program nuklir, peran aktor internasional, dan dinamika ideologis, namun tanpa menyentuh dimensi historis peradaban Islam sebagai kerangka referensi. Studi Umam (2022) tentang rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel menambah wawasan tentang *balance of power* regional, tetapi juga tidak menggali preseden diplomatik Abbasiyah sebagai perspektif alternatif.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan ilmiah dari penelitian ini. Sejauh yang dapat dilacak dari literatur yang tersedia, belum ada kajian yang secara sistematis menghubungkan strategi diplomasi politik Dinasti Abbasiyah dengan dinamika konflik Iran-Israel dalam konteks Timur Tengah kontemporer. Pendekatan historis-komparatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih holistik, bahwa konflik Iran-Israel bukan hanya fenomena abad ke-20 pasca Revolusi Islam 1979, melainkan merupakan manifestasi kontemporer dari pola ketegangan geopolitik yang akar-akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam sejarah peradaban Islam. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya sintesis antara sejarah diplomasi Islam klasik dan analisis geopolitik Timur Tengah modern.

Adapun permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana strategi diplomasi politik yang dipraktikkan oleh Dinasti Abbasiyah dalam menghadapi tekanan internal dan eksternal? dan (2) Bagaimana relevansi strategi diplomasi tersebut terhadap konflik Iran-Israel dalam dinamika Timur Tengah kontemporer? Hipotesis yang diajukan adalah bahwa prinsip-prinsip diplomatik Abbasiyah yang mencakup fleksibilitas ideologi, pengelolaan aliansi lintas batas, dan keterlibatan aktor eksternal memiliki relevansi konseptual yang signifikan untuk memahami dan mengelola konflik Iran-Israel yang berlangsung hingga hari ini. Penelitian ini penting dilakukan mengingat krisis diplomatik di Timur Tengah terus berkembang dan membutuhkan perspektif yang lebih kaya dari sekadar analisis *realpolitik* kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi diplomasi politik Dinasti Abbasiyah secara komprehensif, kemudian mengkontekstualisasikannya dalam dinamika konflik Iran-Israel sebagai bagian dari geopolitik Timur Tengah masa kini. Penelitian ini juga bertujuan memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan studi Hubungan Internasional dari perspektif sejarah peradaban Islam, serta menawarkan rekomendasi konseptual bagi upaya mediasi dan de-eskalasi konflik di kawasan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi para pembuat kebijakan

dan pemangku kepentingan yang bergerak dalam isu perdamaian kawasan Timur Tengah. Originalitas penelitian ini terletak pada jembatan analitis yang dibangun antara sejarah diplomasi Islam klasik dan realitas geopolitik abad ke-21.

Lebih jauh, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu yang sudah selesai, melainkan sebuah repertoar strategi yang dapat dipelajari dan diadaptasi. Dinasti Abbasiyah pernah menghadapi tekanan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami negara-negara modern di Timur Tengah, yaitu ancaman militer dari luar, fragmentasi internal, persaingan ideologi, dan kebutuhan untuk membangun koalisi yang stabil di tengah perbedaan. Cara mereka merespons tantangan tersebut dengan mengedepankan pragmatisme diplomatik, menghargai keberagaman intelektual, dan membangun institusi yang melampaui sekat etnis dan sektarian memberikan pelajaran yang sangat berharga. Konflik Iran-Israel, dengan segala kompleksitasnya, mungkin tidak akan sepenuhnya terselesaikan hanya dengan merujuk pada sejarah, namun pemahaman historis yang lebih dalam dapat memperluas cakrawala solusi yang selama ini belum terpikirkan.

Sebagai penutup pendahuluan ini, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan kontribusi orisinal dalam khazanah studi peradaban Islam dan hubungan internasional, yang berupaya menjembatani sejarah dan kontemporer dalam satu kerangka analitis yang koheren. Kebaruan ilmiah penelitian ini tidak hanya terletak pada perspektif yang ditawarkan, tetapi juga pada metode historis-komparatif yang digunakan untuk menghubungkan dua konteks yang secara temporal sangat berjauhan namun secara tematik memiliki kesinambungan yang kuat. Dengan menghadirkan Dinasti Abbasiyah sebagai cermin bagi dinamika Timur Tengah kontemporer, penelitian ini berharap membuka diskusi akademis yang lebih kaya tentang bagaimana warisan diplomasi Islam klasik dapat memberikan inspirasi bagi upaya perdamaian di masa kini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang Dinasti Abbasiyah dalam perspektif politik dan diplomasi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Siregar et al. (2025) dalam penelitiannya tentang pemikiran politik pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengulas secara mendalam bagaimana ketiga pemikir besar Islam, yaitu Al-Farabi dengan konsep *al-Madinah al-Fadhilah*, Al-Mawardi dengan prinsip *imamah*-nya, dan Ibn Khaldun dengan teori *ashabiyah*-nya, telah merumuskan kerangka teoritis yang lahir sebagai respons terhadap kondisi politik nyata di kedua dinasti tersebut. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa pemikiran

politik Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu merespons dan direfleksikan oleh realitas kekuasaan. Namun demikian, keterbatasan utama dari penelitian ini adalah tidak adanya upaya untuk menghubungkan pemikiran tersebut dengan konflik dan dinamika geopolitik Timur Tengah kontemporer. Arsyad et al. (2024) secara lebih spesifik menganalisis biografi khalifah, kebijakan politik, dan kegemilangan peradaban Abbasiyah, memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana inovasi administratif dan keterbukaan budaya menjadi kunci kesuksesan dinasti ini selama lebih dari lima abad berkuasa.

Dari sisi kontemporer, kajian Nisa (2025) tentang konflik Iran-Israel memberikan analisis yang kuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara, mulai dari program nuklir Iran, dukungan Israel terhadap kelompok oposisi Iran, hingga intervensi aktor internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan berhasil menunjukkan bahwa ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga pada pasar energi global dan hubungan internasional yang lebih luas. Kelebihan penelitian ini terletak pada kedalamannya dalam memetakan dimensi multifaktorial konflik, namun kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan perspektif historis peradaban Islam sebagai salah satu lensa analisis. Studi Umam (2022) tentang rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel menggunakan teori *balance of power* dan strukturalis-konstruktivis untuk menganalisis bagaimana ketiga negara saling mencari mitra sebagai strategi perimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, namun tidak menyentuh dimensi historis peradaban sebagai sumber inspirasi diplomatik.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kerangka konseptual yang saling melengkapi. Pertama, teori *balance of power* sebagaimana dikemukakan oleh Walt dan dikembangkan oleh Healy dan Stein, yang menegaskan bahwa negara-negara yang menghadapi ancaman eksternal akan cenderung mencari perimbangan kekuatan melalui aliansi dan kemitraan.⁴ Kedua, teori *neorealisme* yang dikembangkan oleh Waltz, yang relevan untuk memahami bagaimana negara bertindak dalam sistem internasional yang anarkis guna menjaga kepentingan dan keamanannya.⁵ Ketiga, teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, yang menekankan peran identitas, norma, dan ideologi dalam membentuk perilaku negara,⁶ sebuah kerangka yang sangat relevan untuk memahami mengapa konflik Iran-Israel terus berlangsung

⁴ Khotibul Umam, "Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah," *POPULIKA* 10, no. 2 (July 2022): 1–10, <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509>.

⁵ Mohamad Indra Israqi and Mulawarman Hannase, "Evolusi Wilayah Al-Faqih: Dari Akar Sejarah Safawiyah Hingga Dominasi Politik Iran Modern," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2513–33.

⁶ Anita Zahra Choirun Nisa, "Konflik Iran-Israel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan dan Dampaknya," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8557–68.

meskipun secara rasional kedua pihak memiliki banyak kerugian dari eskalasi yang berkelanjutan. Ketiga teori ini, ketika diintegrasikan dengan perspektif historis diplomasi Abbasiyah, membentuk kerangka analitis yang komprehensif bagi penelitian ini.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-komparatif, yaitu sebuah metode yang berupaya memahami fenomena sosial-politik dengan cara membandingkan realitas historis dan kontemporer secara sistematis.⁷ Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji sumber primer dan sekunder yang relevan, mencakup jurnal ilmiah, buku sejarah peradaban Islam, dokumen kebijakan luar negeri, serta laporan dan analisis geopolitik Timur Tengah kontemporer. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tiga tahapan utama: pertama, identifikasi dan klasifikasi strategi diplomasi politik Dinasti Abbasiyah berdasarkan sumber historis; kedua, analisis faktor-faktor struktural dan ideologis yang membentuk konflik Iran-Israel kontemporer; dan ketiga, sintesis komparatif antara kedua domain tersebut guna menemukan titik-titik relevansi konseptual yang dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika geopolitik Timur Tengah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Diplomasi Politik Dinasti Abbasiyah: Dari Pembangunan Aliansi hingga Pengelolaan Konflik

Dinasti Abbasiyah mewarisi kekhilafahan dari Dinasti Umayyah melalui sebuah revolusi yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis dan sosial. Pemberontakan yang dimulai dari Khurasan dan dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M, dan sejak saat itu Abbasiyah membangun tatanan baru yang secara fundamental berbeda dari pendahulunya.⁸ Salah satu langkah diplomatik pertama yang dilakukan adalah pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad oleh Khalifah al-Mansur pada tahun 762 M. Pemindahan ini bukan sekadar keputusan logistik, melainkan sebuah gestur diplomatik yang sangat kuat, karena dengan memilih Baghdad yang terletak di jantung wilayah Persia, Abbasiyah mengirimkan sinyal kepada kaum *mawali* bahwa mereka diakui dan dilibatkan dalam struktur kekuasaan baru.

⁷ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022).hlm.23

⁸ Arsyad, Zain, and Rama, *Op.Cit*

Strategi inklusivitas ini terbukti sangat efektif dalam meredam ketidakpuasan yang selama era Umayyah menjadi bara api pemberontakan.

Strategi diplomasi Abbasiyah yang paling menonjol adalah kemampuan mereka dalam membangun aliansi lintas etnis dan ideologi sebagai instrumen kekuasaan. Khalifah al-Mansur mengangkat Khalid bin Barmak dari keluarga bangsawan Persia sebagai Wazir pertama, sebuah langkah yang melambangkan formalisasi partisipasi Persia dalam pemerintahan Islam.⁹ Sistem *wazir* ini menjadi salah satu inovasi terbesar Abbasiyah dalam arsitektur pemerintahan, karena memungkinkan distribusi kekuasaan yang lebih luas tanpa mengorbankan otoritas khalifah. Sementara itu, Khalifah al-Mu'tasim mengambil langkah lebih jauh dengan merekrut pasukan dari kalangan Turki, yang kemudian menjadi tulang punggung kekuatan militer Abbasiyah. Meskipun kebijakan ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri ketika pengaruh militer Turki menjadi terlalu besar, pada awalnya strategi ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengelolaan pluralisme sebagai kunci stabilitas.¹⁰

Di bidang diplomasi eksternal, Harun al-Rasyid menunjukkan kecakapan yang luar biasa dalam mengelola hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar di luar dunia Islam. Hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Bizantium yang mencakup pertukaran hadiah diplomatik dan perjanjian damai, serta keterlibatan dengan Dinasti Tang di Tiongkok, memperlihatkan bahwa Abbasiyah tidak terisolasi dalam dunia Islam semata, tetapi aktif membangun jaringan hubungan internasional yang melampaui batas agama dan budaya (Arsyad et al., 2024). Kemampuan Harun al-Rasyid untuk bernegosiasi dan mempertahankan perdamaian dengan Kekaisaran Bizantium yang secara ideologis berseberangan dengan Islam mencerminkan pragmatisme diplomatik yang sangat tinggi. Ini adalah prinsip yang oleh Ibn Khaldun kemudian dirumuskan sebagai kebutuhan untuk membangun *ashabiyah* yang lebih luas dari sekadar ikatan kabilah atau sekte, bahwa solidaritas yang sejati harus dibangun di atas kepentingan bersama dan saling menghormati.¹¹

⁹ Aminullah, *Op.Cit*

¹⁰ Muhammad Amiruddin Dardiri, Waluyo Waluyo, and Anzar Aquil, "KONDISI SOSIAL-POLITIK DINASTI BANI ABBASIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (June 2023): 69–82, <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>.

¹¹ Romadhan Siregar et al., "Pemikiran Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (August 2025): 108–23, <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.303>.

Masa al-Ma'mun memberikan dimensi diplomasi intelektual yang tidak kalah pentingnya. Kebijakan penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani, Persia, India, dan berbagai bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah bukan sekadar proyek akademis, melainkan sebuah strategi diplomatik yang sangat cerdas untuk menempatkan Baghdad sebagai *cosmopolis* dunia, yaitu pusat di mana semua tradisi intelektual dunia bertemu dan berdialog.¹² Dengan menjadikan Baghdad sebagai magnet bagi para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia tanpa memandang agama dan etnis, al-Ma'mun secara tidak langsung membangun *soft power* Islam yang sangat kuat. Strategi *soft power* ini terbukti lebih tahan lama dan lebih efektif dalam membangun pengaruh daripada kekuatan militer semata, sebuah pelajaran diplomatik yang sangat relevan bagi konteks kontemporer.

Abbasiyah juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengelola konflik internal melalui mekanisme diplomasi dan negosiasi. Al-Mawardi, sebagai pemikir politik Abbasiyah yang paling berpengaruh, merumuskan prinsip bahwa seorang pemimpin harus memenuhi tujuh kriteria utama, termasuk keadilan, kemampuan *ijtihad*, dan keberanian, serta memiliki kewajiban untuk melayani rakyat dan dapat dimakzulkan jika gagal memenuhi syarat tersebut.¹³ Konsep ini secara implisit mengandung mekanisme *checks and balances* yang memberikan kerangka hukum bagi negosiasi antara penguasa dan yang dikuasai. Berbeda dari pendekatan Umayyah yang lebih sentralistik, pendekatan Abbasiyah yang lebih inklusif dan berbasis syariat memberikan legitimasi yang lebih luas dan lebih tahan terhadap guncangan, sebuah model yang oleh Al-Farabi diidealisasikan dalam konsep *al-Madinah al-Fadhilah* sebagai negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berilmu.

Dalam konteks pengelolaan tekanan eksternal, Dinasti Abbasiyah juga memperlihatkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Ketika menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok pemberontak seperti Khawarij di Afrika Utara, gerakan Syiah, dan berbagai konflik antarbangsa, Abbasiyah tidak selalu merespons dengan kekuatan militer semata, tetapi juga menggunakan negosiasi, amnesti, dan kooptasi politik untuk meredakan ketegangan.¹⁴ Kebijakan al-Mansur yang menciptakan lembaga-lembaga baru seperti jawatan pos yang berfungsi sebagai jaringan intelijen dan komunikasi merupakan contoh

¹² Arsyad, Zain, and Rama, *Op.Cit*

¹³ Siregar et al., *Op.Cit*

¹⁴ Aminullah *Op.Cit*.

bagaimana infrastruktur administratif dapat berfungsi sebagai alat diplomasi internal. Dengan memastikan bahwa informasi tentang kondisi di daerah-daerah terpencil sampai ke tangan khalifah, al-Mansur dapat merespons potensi konflik sebelum eskalasi terjadi, sebuah strategi *preventive diplomacy* yang sangat relevan dengan praktik pengelolaan konflik modern.

Namun demikian, kejayaan diplomasi Abbasiyah juga mengandung benih-benih kelemahannya sendiri. Ketergantungan yang semakin besar pada pasukan Turki, yang merupakan hasil dari strategi inklusivitas militer, ironisnya menjadi salah satu faktor yang mempercepat disintegrasi politik pada periode-periode selanjutnya. Ketika tentara Turki semakin berkuasa dan mulai mendikte pengangkatan khalifah, sistem *balance of power* internal yang semula berhasil menjaga stabilitas berubah menjadi sumber instabilitas.¹⁵ Ini mengajarkan bahwa strategi diplomasi yang berhasil dalam jangka pendek tidak selalu berkelanjutan dalam jangka panjang, dan bahwa setiap aliansi yang dibangun di atas kalkulasi kepentingan semata tanpa fondasi nilai yang kuat akan rentan terhadap erosi. Pelajaran ini sangat relevan untuk memahami dinamika aliansi-aliansi kontemporer di Timur Tengah, termasuk pola keterlibatan Iran dengan berbagai kelompok proksi di Lebanon, Suriah, dan Irak.

2. Relevansi Strategi Diplomasi Abbasiyah terhadap Konflik Iran-Israel dalam Dinamika Timur Tengah Kontemporer

Konflik Iran-Israel dalam konteks Timur Tengah kontemporer memperlihatkan pola-pola yang memiliki kemiripan struktural dengan dinamika yang pernah dihadapi oleh Dinasti Abbasiyah, meskipun konteks historis dan teknologinya sangat berbeda. Iran pasca-Revolusi Islam 1979 membangun sistem pemerintahan berdasarkan konsep *Wilayat al-Faqih* yang menempatkan ulama sebagai pemimpin tertinggi negara, sebuah doktrin yang tidak hanya berdampak pada politik domestik tetapi juga menjadi instrumen ekspansi ideologis ke seluruh kawasan.¹⁶ Melalui dukungan terhadap Hizbullah di Lebanon, kelompok-kelompok milisi Syiah di Irak, dan rezim Assad di Suriah, Iran membangun jaringan pengaruh yang secara struktural mirip dengan cara Abbasiyah membangun aliansi lintas batas untuk memperkuat posisinya di kawasan. Perbedaannya adalah bahwa Abbasiyah membangun jaringan tersebut berdasarkan inklusivitas dan diplomasi budaya-

¹⁵ Arsyad, Zain, and Rama, *Op.Cit*

¹⁶ Israqi and Hannase, *Op.Cit*

intelektual, sementara Iran lebih banyak mengandalkan ideologi sektarian dan proksi militer, sebuah perbedaan yang memiliki implikasi besar terhadap stabilitas kawasan.

Faktor nuklir menjadi salah satu dimensi paling kritis dalam konflik Iran-Israel yang tidak memiliki padanan langsung dalam sejarah Abbasiyah. Israel menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial yang membenarkan berbagai tindakan militer dan intelijen, termasuk serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan ilmuwan-ilmuwan nuklir terkemuka.¹⁷ Iran, di sisi lain, secara konsisten mengklaim bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai sipil, meskipun IAEA mencatat berbagai kegagalan Iran dalam memenuhi kewajiban non-proliferasinya. Dinamika ini mencerminkan dilema keamanan (*security dilemma*) klasik di mana tindakan defensif satu pihak dipersepsikan sebagai agresi oleh pihak lain, memicu siklus eskalasi yang sulit dihentikan. Dalam konteks historis Abbasiyah, dilema serupa pernah muncul dalam bentuk persaingan antara berbagai faksi internal, dan cara Abbasiyah mengatasinya melalui mekanisme negosiasi dan pembagian kekuasaan memberikan pelajaran bahwa transparansi dan kepercayaan merupakan prasyarat bagi stabilitas jangka panjang.

Dimensi *balance of power* dalam konflik Iran-Israel sangat kompleks dan melibatkan aktor-aktor eksternal yang tidak kalah penting dari kedua protagonis utama. Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, dan Uni Eropa semuanya memiliki kepentingan di kawasan dan secara aktif mempengaruhi dinamika konflik. Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Israel dan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran, sementara Rusia dan China lebih cenderung mendukung Iran dalam menghadapi tekanan Barat. Pola keterlibatan aktor eksternal ini memiliki kemiripan dengan dinamika pada era Abbasiyah, ketika Kekaisaran Persia, Turki, Byzantium, dan berbagai kekuatan regional semuanya memiliki kepentingan dalam stabilitas atau ketidakstabilan dunia Islam. Cara Abbasiyah mengelola keterlibatan aktor eksternal dengan mengedepankan negosiasi bilateral, perjanjian damai, dan pertukaran diplomatik memberikan model yang relevan untuk dipertimbangkan dalam upaya mediasi konflik Iran-Israel.

Salah satu aspek paling relevan dari diplomasi Abbasiyah untuk konteks Iran-Israel adalah pendekatan mereka terhadap perbedaan ideologi dan identitas. Abbasiyah berhasil membangun kekhilafahan yang berlangsung selama lebih dari lima abad justru karena mereka tidak memaksakan keseragaman ideologis, melainkan menciptakan ruang bagi

¹⁷ Nisa, *Op.Cit*

keberagaman dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih luas. Al-Farabi merumuskan bahwa negara yang ideal bukanlah yang homogen, melainkan yang mampu mengintegrasikan keberagaman warganya dalam orientasi bersama menuju kebaikan kolektif. Prinsip ini sangat kontras dengan dinamika konflik Iran-Israel, di mana perbedaan identitas antara Islam Syiah Iran dan negara Yahudi Israel menjadi faktor penguat konflik daripada sumber kekayaan. Mengambil inspirasi dari pendekatan Abbasiyah, resolusi konflik Iran-Israel mungkin membutuhkan pergeseran paradigma dari identitas eksklusif menuju kepentingan bersama di kawasan.¹⁸

Konsep *ashabiyah* Ibn Khaldun juga menawarkan lensa analitis yang sangat relevan untuk memahami mengapa Iran dan Israel tampaknya terjebak dalam spiral konflik yang sulit dihentikan. Menurut Ibn Khaldun, kekuatan sebuah entitas politik terletak pada solidaritas sosial yang mengikat anggotanya, dan ketika solidaritas ini mulai melemah, maka entitas tersebut akan rentan terhadap disintegrasi. Baik Iran maupun Israel masing-masing mempertahankan *ashabiyah* internalnya sebagian dengan cara mempertahankan musuh bersama. Iran menggunakan ancaman Israel sebagai pemersatu identitas revolusioner, sementara Israel menggunakan ancaman Iran sebagai justifikasi bagi kebijakan keamanan yang ketat. Dalam konteks ini, konflik antara keduanya bukan hanya tentang kepentingan material atau keamanan, tetapi juga tentang kebutuhan politik domestik untuk mempertahankan kohesi sosial melalui narasi ancaman eksternal, sebuah dinamika yang sudah lama dikenali dalam sejarah peradaban Islam.¹⁹

Pelajaran diplomasi Abbasiyah yang mungkin paling mendesak untuk konteks Iran-Israel adalah pentingnya membangun kepercayaan (*trust-building*) sebagai fondasi bagi segala bentuk negosiasi yang bermakna. Dalam dinamika Abbasiyah, kepercayaan antara berbagai kelompok etnis dan ideologis dibangun melalui kombinasi kebijakan inklusif, pemenuhan janji diplomatik, dan pemberian ruang bagi partisipasi politik yang bermakna. Harun al-Rasyid membangun reputasi sebagai khalifah yang adil dan dapat diandalkan melalui serangkaian kebijakan yang menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat, terlepas dari latar belakang etnis atau agama mereka. Dalam konteks Iran-Israel, kepercayaan adalah komoditas yang paling langka dan paling dibutuhkan, sehingga upaya

¹⁸ Siswanto Masruri and Erham Budi Wiranto, *Oksidentalisme: Sikap Timur Terhadap Barat* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2021).hlm. 54

¹⁹ W.M. Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018).hlm 111

membangun kepercayaan perlu mengambil inspirasi dari mekanisme yang terbukti berhasil dalam sejarah, termasuk pengalaman Abbasiyah.²⁰

Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga intelektual juga merupakan aspek diplomasi Abbasiyah yang memiliki relevansi tinggi untuk konteks kontemporer. Baitul Hikmah bukan hanya sebuah perpustakaan, tetapi sebuah ruang publik di mana berbagai tradisi intelektual bertemu dan berdialog, menciptakan fondasi bagi pemahaman yang lebih mendalam dan toleransi yang lebih tulus. Dalam konteks konflik Iran-Israel, inisiatif yang melibatkan pertukaran akademis, dialog antaragama, dan proyek-proyek ilmu pengetahuan bersama memiliki potensi untuk membangun fondasi pemahaman yang dapat mendukung upaya-upaya diplomatik yang lebih formal. Pengalaman Abbasiyah menunjukkan bahwa peradaban yang bertahan lama adalah yang mampu menciptakan ekosistem intelektual di mana pertukaran ide bebas berlangsung tanpa hambatan identitas eksklusif.²¹

E. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan, bahwa strategi diplomasi politik Dinasti Abbasiyah memiliki relevansi konseptual yang signifikan terhadap pemahaman dan pengelolaan konflik Iran-Israel dalam dinamika Timur Tengah kontemporer. Temuan utama penelitian ini mencakup identifikasi tiga prinsip diplomatik inti Abbasiyah yang relevan untuk konteks kontemporer, yaitu inklusivitas dan pengelolaan pluralisme sebagai strategi stabilisasi jangka panjang, pragmatisme diplomatik yang melampaui batas ideologi dalam mengelola hubungan dengan kekuatan yang secara ideologis berseberangan, serta pembangunan *soft power* melalui kepemimpinan intelektual sebagai instrumen pengaruh yang lebih berkelanjutan daripada kekuatan militer semata. Konflik Iran-Israel, dengan segala kompleksitas dimensi nuklir, ideologis, dan geopolitiknya, membutuhkan pendekatan diplomatik yang lebih holistik dan berbasis kepercayaan, sebuah pendekatan yang secara historis pernah dipraktikkan dengan relatif berhasil oleh Dinasti Abbasiyah dalam konteks yang berbeda namun secara tematik memiliki kesinambungan yang kuat.

Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya, kajian ini merekomendasikan beberapa agenda riset yang dapat memperluas dan memperdalam temuan yang telah dihasilkan. Pertama, perlu

²⁰ Nisa, "Konflik Iran-Israel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan dan Dampaknya."

²¹ Amiruddin Dardiri, Waluyo, and Aquil, *Op.Cit*

dilakukan penelitian yang lebih spesifik tentang bagaimana mekanisme-mekanisme diplomatik konkret Abbasiyah, seperti sistem wazir, pertukaran diplomatik, dan pengelolaan milisi multietnis, dapat diadaptasi menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis bagi upaya mediasi konflik Iran-Israel. Kedua, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana konsep pemikiran politik Islam klasik seperti *ashabiyah* Ibn Khaldun, *al-Madinah al-Fadhilah* Al-Farabi, dan prinsip *imamah* Al-Mawardi dapat menjadi kerangka normatif bagi arsitektur perdamaian kawasan Timur Tengah yang lebih inklusif. Ketiga, penelitian komparatif yang lebih luas yang melibatkan dinasti-dinasti Islam lainnya seperti Utsmaniyah dan Fatimiyah dengan konflik-konflik kontemporer di kawasan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan lebih nuansir tentang relevansi sejarah peradaban Islam bagi studi Hubungan Internasional modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. Najili. *DINASTI BANI ABASSIYAH, POLITIK, PERADABAN DAN INTELEKTUAL*.2017.
- Amiruddin Dardiri, Muhammad, Waluyo Waluyo, and Anzar Aquil. “KONDISI SOSIAL-POLITIK DINASTI BANI ABBASIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (June 2023): 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>.
- Arsyad, Mujahid Mallombasi, Muhammad Zain, and Bahaking Rama. “Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, dan Kegemilangan Peradaban Islam.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 85–98.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Israqi, Mohamad Indra, and Mulawarman Hannase. “Evolusi Wilayah Al-Faqih: Dari Akar Sejarah Safawiyah Hingga Dominasi Politik Iran Modern.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2513–33.
- Nisa, Anita Zahra Choirun. “Konflik Iran-Israel: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Hubungan dan Dampaknya.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8557–68.
- Siregar, Romadhan, Agung Prasetio, Faris Naufal, and Marzuki Manurung. “Pemikiran Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (August 2025): 108–23. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.303>.
- Siswanto Masruri and Erham Budi Wiranto. *Oksidentalisme: Sikap Timur Terhadap Barat*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Umam, Khotibul. “Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah.” *POPULIKA* 10, no. 2 (July 2022): 1–10. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509>.
- W.M. Watt. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.